KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA 128 KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2020;

b. bahwa hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2020, telah melalui proses penilaian, verifikasi, dan validasi oleh Evaluator Eksternal, serta reviu dan pengolahan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2020 dilaksanakan terhadap 128 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebagai dampak dari pandemi covid-19 dan penyesuaian anggaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

KEDUA : Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN,
LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	2,57	Cukup
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,07	Baik
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,67	Baik
4	Kementerian Pemuda Olahraga	1,88	Cukup
5	Kementerian Pertahanan	2,74	Baik
6	Kementerian Kesehatan	2,82	Baik
7	Kementerian Agama	2,69	Baik
8	Kementerian Sosial	2,73	Baik
9	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2,60	Baik
10	Dewan Perwakilan Rakyat	3,34	Baik
11	Dewan Perwakilan Daerah	2,94	Baik
12	Mahkamah Agung RI	2,89	Baik
13	Sekretariat Kabinet	2,83	Baik
14	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,04	Baik
15	Badan Keamanan Laut	2,43	Cukup

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
16	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2,83	Baik
17	Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,38	Baik
18	Badan Narkotika Nasional	2,90	Baik
19	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3,24	Baik
20	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1,99	Cukup
21	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,97	Baik
22	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3,37	Baik
23	Lembaga Ketahanan Nasional RI	2,78	Baik
24	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	3,85	Sangat Baik
25	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2,78	Baik
26	Komisi Pemberantasan Korupsi	3,42	Baik
27	Ombudsman Republik Indonesia	3,45	Baik
28	Pemerintah Provinsi Bengkulu	2,90	Baik
29	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,23	Baik
30	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3,16	Baik
31	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2,80	Baik
32	Pemerintah Provinsi Lampung	2,78	Baik
33	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,26	Baik
34	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,08	Baik
35	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	3,17	Baik
36	Pemerintah Kabupaten Bangka	2,77	Baik
37	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	3,22	Baik
38	Pemerintah Kabupaten Banjar	2,68	Baik
39	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	2,46	Cukup
40	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	2,03	Cukup
41	Pemerintah Kabupaten Banyumas	3,09	Baik
42	Pemerintah Kabupaten Belitung	3,07	Baik

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
43	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	3,15	Baik
44	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	2,27	Cukup
45	Pemerintah Kabupaten Bintan	2,42	Cukup
46	Pemerintah Kabupaten Blora	2,62	Baik
47	Pemerintah Kabupaten Bogor	3,27	Baik
48	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	2,74	Baik
49	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	2,30	Cukup
50	Pemerintah Kabupaten Ciamis	2,64	Baik
51	Pemerintah Kabupaten Cianjur	3,19	Baik
52	Pemerintah Kabupaten Cilacap	3,13	Baik
53	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	2,63	Baik
54	Pemerintah Kabupaten Garut	3,26	Baik
55	Pemerintah Kabupaten Gianyar	3,17	Baik
56	Pemerintah Kabupaten Indramayu	3,44	Baik
57	Pemerintah Kabupaten Jember	2,23	Cukup
58	Pemerintah Kabupaten Jembrana	2,66	Baik
59	Pemerintah Kabupaten Jepara	2,85	Baik
60	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	2,60	Baik
61	Pemerintah Kabupaten Kebumen	3,42	Baik
62	Pemerintah Kabupaten Kediri	3,56	Sangat Baik
63	Pemerintah Kabupaten Klungkung	3,10	Baik
64	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	2,85	Baik
65	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	2,92	Baik
66	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	2,77	Baik
67	Pemerintah Kabupaten Kudus	2,98	Baik
68	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2,97	Baik
69	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	2,93	Baik
70	Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	3,17	Baik
71	Pemerintah Kabupaten Lumajang	3,20	Baik
72	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	2,71	Baik
73	Pemerintah Kabupaten Madiun	3,30	Baik

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
74	Pemerintah Kabupaten Magelang	2,94	Baik
75	Pemerintah Kabupaten Magetan	2,86	Baik
76	Pemerintah Kabupaten Majalengka	2,62	Baik
77	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	2,79	Baik
78	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	2,62	Baik
79	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	3,12	Baik
80	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	2,94	Baik
81	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	3,01	Baik
82	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	3,02	Baik
83	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	3,03	Baik
84	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	3,04	Baik
85	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	3,30	Baik
86	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	2,93	Baik
87	Pemerintah Kabupaten Rembang	3,11	Baik
88	Pemerintah Kabupaten Samosir	3,31	Baik
89	Pemerintah Kabupaten Sanggau	2,03	Cukup
90	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	2,97	Baik
91	Pemerintah Kabupaten Serang	2,98	Baik
92	Pemerintah Kabupaten Solok	3,50	Sangat Baik
93	Pemerintah Kabupaten Sragen	3,35	Baik
94	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	2,37	Cukup
95	Pemerintah Kabupaten Sumedang	3,81	Sangat Baik
96	Pemerintah Kabupaten Tabalong	2,29	Cukup
97	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	3,00	Baik
98	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	3,21	Baik
99	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	2,68	Baik
100	Pemerintah Kabupaten Tapin	2,16	Cukup
101	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	3,20	Baik
102	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	2,96	Baik
103	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	2,05	Cukup
104	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	2,79	Baik
105	Pemerintah Kota Banda Aceh	2,87	Baik
106	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,62	Baik
107	Pemerintah Kota Batam	3,11	Baik

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
108	Pemerintah Kota Batu	2,62	Baik
109	Pemerintah Kota Blitar	3,31	Baik
110	Pemerintah Kota Bontang	3,28	Baik
111	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,80	Baik
112	Pemerintah Kota Cirebon	3,02	Baik
113	Pemerintah Kota Dumai	2,25	Cukup
114	Pemerintah Kota Kediri	3,49	Baik
115	Pemerintah Kota Kendari	2,37	Cukup
116	Pemerintah Kota Magelang	3,21	Baik
117	Pemerintah Kota Manado	2,64	Baik
118	Pemerintah Kota Medan	3,13	Baik
119	Pemerintah Kota Padang	2,96	Baik
120	Pemerintah Kota Palembang	3,02	Baik
121	Pemerintah Kota Pasuruan	2,47	Cukup
122	Pemerintah Kota Payakumbuh	2,89	Baik
123	Pemerintah Kota Samarinda	3,28	Baik
124	Pemerintah Kota Sawahlunto	2,88	Baik
125	Pemerintah Kota Sukabumi	2,72	Baik
126	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2,39	Cukup
127	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2,72	Baik
128	Pemerintah Kota Tegal	3,00	Baik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO